

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agustina Shinta dkk, 2016, Penafsiran Unsur Melawan Hukum Dalam Pasal 2 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta: LEIP,
- Aroma Elmina Martha, 2020, Kriminologi Suatu Pengantar, Yogyakarta : Litera.
- Azyumardi Azra, 2005, Agama dan Pemberantasan Korupsi Jakarta : Penerbit PSAP.
- Aziz Syamsuddin, 2011, Tindak Pidana Khusus, Jakarta : Sinar Grafika
- Djoko Sumaryanto, 2009, Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara, , Jakarta : Prestasi Pustaka Publisher.
- H. Pudi Rahardi, 2007, Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri), Surabaya: Penerbit Laskbang Grafika.
- Jawade Hafidz Arsyad, 2017, Korupsi dalam Perspektif HAN, Jakarta: Sinar Grafika.
- Lilik Mulyadi, 2010, Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- M. Gaussyah, 2014, Peranan dan Kedudukan Polri dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Jakarta : Kemitraan.
- M. Husein Harun, 1991, Penyidik dan penuntut dalam proses pidana, Jakarta: Rineka Cipta.
- Mien Rukmini, 2006, Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi. Bandung : Alumni.
- Munir Fuady, 2002, Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer, Bandung : Cipta Raya Bhakti.
- Nasaruddin Umar, 2019, Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia & Strategi Khusus Pembinaan Narapidana Korupsi, Ambon : LP2M IAIN.
- Nursariani Simatupang Faisal, 2017, Kriminologi Suatu Pengantar, Medan : Pustaka Prima.

- Nursya, 2020, Beberapa Bentuk Perbuatan Pelaku Berkaitan Dengan Tindak Pidana Korupsi (Menurut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi) Jakarta : Alungadan Mandiri.
- Robert Klitgaard, 2001, Membasmi Korupsi, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Sadjijono, 2008, Polri dalam perkembangan Hukum di Indonesia, Yogyakarta : Laksbang Presindo.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2021, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Sudarsono, 2009, Kamus Hukum, Jakarta: Rineka Cipta.
- Wirjono Prodjodikoro, 2009, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta : Sinar Grafika.
- Yoyok Uruk Suyono, 2014, Hukum Kepolisian Kedudukan Polri Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Uud 1945, Surabaya : Laksabang Grafika.
- Zulkarnain W. Harahap dkk, “Analisis Yuridis Tentang Peranan Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi (Studi Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara)”, Jurnal Retentum, Volume 3 Nomor 1, Tahun Februari 2022

B. Jurnal

- Barhamudin, “Kedudukan Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Menurut Sistem Peradilan Pidana, Jurnal Leex crime, Volume 18 Nomor 2, Bulan Mei 2020
- Lesta Indra Waspada, Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Volume 6, Nomor 1, Juni 2021
- Noveydi Rumagit dkk, “Proses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Pengadaan Barang Mesin Saw Mill Tahun Anggaran 2010 Di Kota Bitung”, Jurnal Lex Administratum, Volume: VIII, Nomor: 2 Apr-Jun 2020.
- Ola Rongan Wilhelmus, Korupsi: Teori, Faktor Penyebab, Dampak, Dan Penanganannya, Jurnal Pendidikan Agama Katolik, Nomor 1 Volume 17, Tahun Ke- 9 Tahun 2017.
- Zulkarnain W. Harahap dkk, “Analisis Yuridis Tentang Peranan Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi

(Studi Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara)”, Jurnal Retentum, Volume 3 Nomor 1, Februari Tahun 2022.

Happy Febrina Hariyan, dkk, “Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Korupsi Di Kawasan Asia Pasifik, Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan” , Volume 5 Nomor 2 Tahun Februari 2016

Dwi Asri Mukaromah, “Faktor Penyebab Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Ajaran Sosialis Oleh Karl Marx”, Jurnal Recidive, Volume 2, Nomor 2, Mei-Agustus 2013

C. Peraturan Perundang Undangan dan Putusan Pengadilan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan No. PRT – PM – 06/1957 tertanggal 9 April 1957 jam 13.00, yang diterbitkan oleh Kepala Staff Angkatan Darat selaku Penguasa Militer atas Daerah Angkatan Darat di Seluruh Wilayah Indonesia. Dalam ketentuan ini dinyatakan secara tegas bahwa Korupsi adalah tindak pidana, hal ini adalah kriminalisasi korupsi.

Peraturan Penguasa Perang Pusat untuk daerah Angkatan Darat tanggal 16 April 1958 No.Prt/Peperpu/013/1958beserta peraturan pelaksanaan dan Peraturan Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Laut No. Prt/Z.I/I/7 tanggal 17 April 1958.

Putusan Nomor: 20/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST

Putusan Nomor : 36/PID/TPK/2013/PT.DKI

Putusan Nomor : 46/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.JKT.PST

Putusan Nomor: 13/PID. SUS-TPK/ 2021/ PT. DKI,

Putusan MA Nomor: 4356 K/PID.SUS/2021,

Putusan Nomor: 01/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mdn

Putusan Nomor : 64/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg